Jurnal Riset Ilmu Akuntansi
Vol. 7 Nomor 2, September 2026
ISSN: 2798-7434 (Online)
ISSN: 2747-2256 (Cetak)

STUDI DESKRIPTIF TENTANG PELAPORAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (SCR) PADA SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Peri Hamdayani[1], Lilik Handajani[2]
[1,2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram
E-mail: perihamdayani123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020–2024 dengan meninjau indikator GRI, akun CSR, alokasi dana, serta perbedaan besaran alokasi dana antara BUMN dan Non-BUMN. Metode yang digunakan kuantitatif. Hasil menunjukkan perusahaan mengungkapkan 34 indikator lingkungan GRI terkait aspek bahan dan energi (10%), air dan keanekaragaman hayati (20%), emisi-limbah- efluen (30%), dan produk, kepatuhan dan transportasi (10%) dan aspek (30%) sebagai wujud transparansi dan keberlanjutan. Pada pelaporan keuangan, terdapat variasi istilah akun terkait pendapatan. Perbandingan menunjukkan persentase sama, tetapi BUMN 2% cenderung berorientasi pada kewajiban regulasi, sedangkan Non-BUMN 1% bersifat strategis. Temuan menekankan pentingnya pengungkapan CSR yang sistematis dan konsisten

Kata kunci: corporate social responsibility, global reporting initiative, bursa efek indonesia, sektor mining

ABSTRACT

This study aims to describe Corporate Social Responsibility (CSR) reporting practices in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2020–2024 period by reviewing GRI indicators, CSR accounts, fund allocations, and differences in fund allocations between state- owned and non-state-owned enterprises (BUMN). The method used is qualitative. The results show that companies disclose 34 GRI environmental indicators related to materials and energy (25%), water and biodiversity (30%), emissions-waste-effluent (40%), and products, compliance and transportation (18%) and aspects (50%) as a form of transparency and sustainability. In financial reporting, there are variations in account terms related to revenue. The comparison shows similar percentages, but 2% of state-owned enterprises tend to be oriented towards regulatory obligations, while 1% of non-state-owned enterprises are strategic. The findings emphasize the importance of systematic and consistent CSR disclosure.

Keywords: *corporate social responsibility, global reporting initiative, indonesia stock exchange, mining sector*

PENDAHULUAN

Salah satu pemangku kepentingan paling penting bagi perusahaan adalah masyarakat lokal karena persepsi dan penerimaan mereka terhadap aktivitas perusahaan sangat menentukan keberlanjutan operasional dan legitimasi sosial perusahaan (Arifina & Darwinsyah, 2023). Hubungan yang kurang harmonis sering menimbulkan konflik, misalnya penolakan masyarakat terhadap aktivitas penambangan, dampak lingkungan, atau ketidakadilan distribusi manfaat sosial sehingga diperlukan strategi proaktif dari perusahaan untuk membangun kepercayaan dan kapabilitas bersama. Di sinilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya sebagai wujud filantropi, tetapi sebagai strategi keberlanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Meskipun kerangka regulasi di Indonesia sudah ada, meliputi kewajiban pelaporan keberlanjutan, banyak penelitian menunjukkan bahwa praktik CSR di lapangan masih sering bersifat insidental, kurang transparan, dan terkadang hanya untuk memperbaiki citra (misalnya di banyak perusahaan pertambangan). Pada penelitian terdahulu (Hidayah, 2022; Kartasasmita, 2020; Maf'ulla & Rachmawati, 2024) menyatakan bahwa di Indonesia masih banyak perusahaan-perusahaan pertambangan yang melaksanakan program CSR secara jangka pendek dan kurang berkelanjutan hanya untuk memperbaiki citra sesaat. Bahkan, pengungkapan CSR dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan sering kali tidak dilakukan secara terbuka dan terstandarisasi (Publicuho et al., 2022). Hal ini sejalan dengan temuan dari (Salim & Mulia, 2024), meskipun CSR memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan, terdapat banyak kasus penyelewengan dana CSR. Di sisi lain, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa ketika CSR dilakukan secara konsisten dan transparan, hal itu dapat membangun kepercayaan publik, meningkatkan reputasi perusahaan serta mendukung pembangunan masyarakat lokal dalam jangka panjang (misalnya melalui pemberdayaan komunitas, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan).

Berbagai variabilitas tersebut, termasuk perbedaan penamaan akun CSR, alokasi dana, dan orientasi pelaksanaan antara perusahaan BUMN dan swasta, menunjukkan adanya kebutuhan kuat akan penelitian empiris komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama yakni alokasi dana CSR, variasi penamaan akun CSR, dan perbedaan praktik CSR antara BUMN dan Non-BUMN di sektor pertambangan dengan harapan hasilnya dapat memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan relevansi sosial CSR bagi regulator, perusahaan, dan masyarakat (Nagu, 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Legitimacy Theory

Teori legitimasi mengungkapkan bahwa perusahaan secara berkelanjutan melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan aturan dan batasan yang ada. Teori legistimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat. Pengertian teori legistimasi dapat dipahami dari pernyataan (Suchman, 2016) mendefinisikan legitimasi sebagai *"a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs and definitions*." (Aziz et al., 2022). Manajemen percaya bahwa legitimasi tidak hanya meningkatkan peluang untuk menarik sumber daya ekonomi dan mengurangi ancaman dari tekanan pihak eksternal, tetapi jugan berguna untuk mematikan adanya dukungan sosial dan politik (Solano & Montoya, 2019). Dengan membangun reputasi positif di mata pemangku kepentingan, maka perusahaan dapat terus memepertahankan kelangsungan hidupnya (Solano & Montoya, 2019).

Stakeholder Theory

Teori stakeholder *(Stakeholder Theory)* pertama kali diperkenalkan oleh (Freeman et al., 2002) dan telah berkembang menjadi salah satu teori utama dalam manajemen strategis dan etika bisnis. Gray et al., mendefinisikan bahwa stakeholder adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan dan dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan (Setiawan, 2022). Manajemen percaya bahwa legitimasi tidak hanya meningkatkan peluang untuk menarik sumber daya ekonomi dan mengurangi ancaman dari tekanan pihak eksternal, tetapi jugan berguna untuk mematikan adanya dukungan sosial dan politik (Masud et al., 2018). Dengan membangun reputasi positif di mata pemangku kepentingan, maka perusahaan dapat terus memepertahankan kelangsungan hidupnya (Steurer, 2006)

Corporate Social Responsibility

Definisi Umum CSR adalah komitmen berkelanjutan oleh perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup dari tenaga kerja dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat pada umumnya. Menurut (Zain et.al., 2021), CSR adalah mekanisme alami sebuah perusahaan untuk 'membersihkan' keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh. Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan untuk memperoleh keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, naik itu yang tidak disengaja apalagi yang disengaja (Widhianto, 2024). Dengan menerapkan pelaporan CSR yang transparan dan akuntabel, perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, investor, dan pemerintah (Silvera, 2024).

Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Pengungkapan CSR merupakan sebuah konsep tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmosnis dengan masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Pelaporan CSR berfungsi sebagai sarana komunikasi perusahaan dengan publik mengenai aktivitas sosial dan lingkungan (Nugroho, 2019). Namun, praktik pelaporan ini masih sangat bervariasi, baik dari segi format, isi, hingga standar yang digunakan. Standar yang paling banyak digunakan dalam pelaporan CSR adalah *Global Reporting Initiative* (GRI) karena kemampuannya dalam meningkatkan keterbandingan antar perusahaan(Yunus & Riatno, 2019).

MODEL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis data yang berkaitan dengan pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Lokasi penelitian ini dilakukan secara kepustakaan dengan mengakses data sekunder dari *website* resmi BEI (www.idx.co.id/id) untuk daftar perusahaan pertambangan yang aktif tercatat atau website perusahaan dan dokumen publikasi resmi (laporan tahunan/laporan keberlanjutan) perusahaan pertambangan terpilih. Penelitian ini akan mencakup perusahaan-perusahaan yang aktif dalam sektor pertambangan dan telah mempublikasikan annual report serta *sustainability report* mereka pada periode 2020-2024.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan terbuka yang bergerak di sektor pertambangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020–2024, memiliki laporan keuangan yang lengkap serta dapat diakses secara publik, dan secara eksplisit melaporkan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) baik melalui laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan *(sustainability report).*

Prosedur Analisis Data yang digunakan sebagai berikut:

Analisis Persentas alokasi dana

1. Menghitung total dana yang dialokasikan untuk csr oleh masing-masing perusahaan.
2. Menggunakan rumus untuk menghitung persentase alokasi dana Persentase Alokasi Dana = ((Dana CSR)/(Total Pendapatan)) x 100

Analisis Variasi penamaan akun csr

1. Mengkategorikan nama-nama akun CSR yang digunakan oleh setiap perusahaan.
2. Membuat daftar variasi penamaan, mengidentifikasi pola atau kesamaan antara perusahaan.

3. Meyajikannya dalam bentuk tabel.

Analisis perbedaan besaran dana CSR BUMN dan Non-BUMN

1. Mengelompokkan perusahaan berdasarkan ststus (BUMN atau Non-BUMN).
2. Menghitung rata-rata alokasi dana CSR untuk masing-masing kelompok.
3. Menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara besaran dana yang dikeluarkan oleh BUMN dan Non-BUMN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan Pada Sektor Dan Subsektor Pertambangan

Tabel 1. Perusahaan Pada Sektor dan Subsektor Pertambangan

No	Sub Sektor	Jumlah Perusahaan
1.	Logam dan Mineral	5
2.	Batu Bara	52
3.	Gas Bumi	1
4.	Minyak dan Gas Bumi	31
5.	Penggalian Tanah dan Batu	4
Total		**93**

Sumber: Olahan Penlitian, 2026

Terdapat 93 perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI pada periode 2020–2024, yang terbagi dalam subsektor logam dan mineral, batubara, minyak dan migas, serta penggalian tanah dan batu. Subsektor logam dan mineral, subsektor batubara merupakan yang terbesar dengan perusahaan, subsektor minyak dan migas, sedangkan subsektor penggalian tanah dan batu.

Indikator Pengungkapan CSR

Tabel 2. Indikator CSR Perusahaan Pertambangan

No	Indiktaor	Kode
1.	Aspek Bahan dan Energi	• EN1 : Penggunaan bahan baku berdasarkan berat/volume. • EN2 : Persentase bahan baku daur ulang • EN3 -EN4-EN5-EN6-EN7 : Konsumsi energi dalam dan luar organisasi, intensitas energi, pengurangan konsumsi energi
2.	Aspek Air dan Keanekaragaman Hayati	• EN8-EN9-EN10 : Pengambilan air, sumber air terdampak, volume air daur ulang. • EN11-EN12-EN13-EN14 : Lokasi operasi dekat kawasan lindung, dampak terhadap keanekaragaman hayati, habitat yang dipulihkan, spesies terdampak
3.	Aspek Emisi, Lombah, dan Efluen	• EN15-EN16-EN17-EN18-EN1-EN20-EN21 : Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung dan tidak langsung, intensitas emisi, pengurangan emisi, emisi ozon, NOx dan SOx • EN22-EN23-EN24-EN25-EN26: Limbah cair, limbah padat, tumpahan signifikan, limbah berbahaya, dampak terhadap badan air
4.	Aspek Produk, Kepatuhan, dan Transportasi	• EN27-EN28 : Mitigasi dampak produk dan jasa, kemasan yang direklamasi. • EN29 : Denda/sanksi terkait lingkungan. • EN30 : Dampak lingkungan dari transportasi produk dan tenaga kerja.

5.	Aspek Lain-lain	• EN31-EN32-EN33-EN34 : Investasi lingkungan, penapisan pemasok, dampak lingkungan dalam rantai pasok, serta mekanisme pengaduan lingkungan.

Sumber: Olahan Penlitian, 2026

Indikator lingkungan GRI terdiri dari 34 poin yang mencakup berbagai aspek utama, mulai dari penggunaan bahan baku dan energi; pengelolaan air serta keanekaragaman hayati; pengukuran dan pengendalian emisi, limbah, dan efluen; hingga aspek terkait produk, kepatuhan, dan transportasi. Indikator ini juga mencakup aspek lainnya seperti investasi lingkungan, evaluasi pemasok, dampak dalam rantai pasok, serta mekanisme pengaduan. Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut dirancang untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan secara komprehensif dan memastikan bahwa aktivitas operasional dijalankan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (Dirawan, 2024)

Jenis Aktivitas CSR

Tabel 3. Bentuk CSR

No	Aspek CSR	Bentuk Kegiatan CSR	Panduan / Acuan (mis. GRI)	Deskripsi
1	Ekonomi	Pemberdayaan ekonomi lokal, pelatihan kewirausahaan, dukungan UMKM, pembangunan infrastruktur ekonomi	GRI Standard 200: Economic Performance	Menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
2	Sosial	Program pendidikan, kesehatan masyarakat, pelatihan tenaga kerja lokal, bantuan sosial	GRI Standard 400: Social Topics	Fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan sosial.
3	Lingkungan	Reklamasi tambang, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, penurunan emisi	GRI Standard 300: Environmental Topics	Menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan dan pengelolaan dampak ekologis.

Sumber: Olahan Penlitian, 2026

Hal ini menunjukkan klasifikasi utama kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan tambang berdasarkan pedoman GRI (*Global Reporting Initiative*), yang memberikan kerangka jelas untuk memahami bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada aspek ekonomi, CSR berfokus pada kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, pelatihan kewirausahaan, dukungan UMKM, dan pembangunan infrastruktur. Aspek sosial menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan tenaga kerja, dan bantuan sosial. Sementara itu, aspek lingkungan mencakup upaya reklamasi lahan pascatambang, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, serta pengurangan emisi dan pencemaran untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Secara keseluruhan, klasifikasi ini berfungsi sebagai panduan dalam menilai penerapan CSR yang seimbang di tiga dimensi utama serta memastikan bahwa praktik yang dilakukan sesuai dengan standar GRI sehingga hasil analisis lebih kredibel dan bermanfaat untuk penelitian maupun evaluasi kinerja sosial perusahaan.

Penamaan Akun CSR

Tabel 4. Penamaan Akun CSR

Penamaan Akun CSR	Jumlah Perusahaan	Persentae (%)
CSR – Corporate Social Responsibility	52	55,91%
TJSL – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	23	24,73%
PPM – Program Pemberdayaan Masyarakat	18	19,35%
Total	93	100%

Sumber: Olahan Penlitian, 2026

Berdasarkan data dari 93 perusahaan, mayoritas menggunakan penamaan akun CSR *(Corporate Social Responsibility)* yaitu sebanyak 52 perusahaan atau 55,91%. Hal ini menunjukkan bahwa istilah CSR masih menjadi terminologi yang paling dominan dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena bersifat universal dan telah lama digunakan dalam praktik bisnis serta pelaporan keberlanjutan. Sementara itu, 23 perusahaan (24,73%) menggunakan istilah PPM (Program Pemberdayaan Masyarakat) dan 19 perusahaan (19,35%) menggunakan istilah TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Penggunaan PPM umumnya ditemukan pada sektor yang memiliki kewajiban pemberdayaan masyarakat, sedangkan TJSL lebih menyesuaikan dengan istilah dalam regulasi di Indonesia. Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan penamaan, substansi yang dilaporkan tetap berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan..

Persentase (%) CSR

Tabel 5. Persentase (%) CSR

NO	Jenis Perusahaan	Jumlah	CSR terhadap Pendapatan *(Revenue)*
1.	BUMN	5	2%
2.	NON BUMN	88	1%

Sumber: Olahan Penlitian, 2026

CSR terhadap Pendapatan BUMN=Total CSR /Total Pendapatan × 100% 1.680.690.000/ Rp 764.493.107 x 100% = 2%

CSR terhadap Pendapatan NON BUMN = Total CSR /Total Pendapatan x 100% 12.641.350.000 Rp 46.679.861.040 x 100% = 1%

Rata-rata persentase alokasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap pendapatan (*revenue)* pada perusahaan pertambangan selama periode 2020–2024 menunjukkan perbedaan antara perusahaan BUMN dan Non-BUMN. Perusahaan BUMN memiliki rata-rata alokasi CSR terhadap pendapatan sebesar 2%,. Sementara itu, perusahaan Non-BUMN mencatatkan rata-rata alokasi CSR terhadap pendapatan sebesar 1%.

Perbedaan Alokasi Biaya CSR Antara Perusahaan BUMN Dengan NON-BUMN

Hasil analisis menunjukkan bahwa baik perusahaan BUMN maupun Non-BUMN memiliki rata-rata alokasi biaya CSR sebesar 2,5% terhadap pendapatan, namun terdapat perbedaan pada nominal dana, orientasi pelaksanaan, dan fokus program. Perusahaan BUMN, dengan kapasitas pendapatan yang lebih besar, menyalurkan dana CSR lebih tinggi secara nominal serta melaksanakannya berdasarkan kewajiban regulatif seperti UU No. 19 Tahun 2003 dan PER- 05/MBU/2007, sehingga program cenderung diarahkan pada pembangunan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur publik. Sebaliknya, perusahaan Non-BUMN menjalankan CSR secara strategis dan berbasis reputasi, dengan fokus pada pengelolaan lingkungan, konservasi sumber daya, dan pengembangan masyarakat lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun persentase alokasi CSR sama, motivasi

dan orientasi pelaksanaannya berbeda, di mana BUMN lebih berorientasi kepatuhan, sementara Non-BUMN berorientasi pada keberlanjutan bisnis dan citra perusahaan.

Tingkat Pengungkapan CSR

Berdasarkan telaah laporan tahunan dan laporan keberlanjutan periode 2020–2024, tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan pertambangan menunjukkan pola yang fluktuatif sejalan dengan dinamika kinerja keuangan dan perubahan harga komoditas global. Mayoritas perusahaan dalam sampel merupakan NON BUMN yang secara regulatif dituntut memiliki tingkat pengungkapan CSR yang lebih tinggi, namun dominasi tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan konsistensi dan kualitas pengungkapan, terutama ketika perusahaan menghadapi tekanan pendapatan. Sub-sektor batubara menunjukkan tingkat pengungkapan CSR yang relatif lebih tinggi pada periode 2021–2022 seiring dengan peningkatan kinerja, khususnya pada aspek kontribusi ekonomi, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, sementara perusahaan yang bergantung pada satu komoditas seperti TINS cenderung mengalami penurunan tingkat pengungkapan CSR akibat keterbatasan fleksibilitas operasional. Secara umum, tingkat pengungkapan CSR relatif rendah pada awal periode pengamatan, meningkat pada fase pertumbuhan kinerja, dan kembali melemah pada periode berikutnya, yang mencerminkan bahwa pengungkapan CSR di sektor pertambangan masih sangat dipengaruhi oleh siklus pasar, volatilitas komoditas, serta tantangan adaptasi terhadap agenda transisi energi dan tuntutan keberlanjutan jangka panjang.

Fokus Utama Pelaporan CSR

Dari total 93 perusahaan yang dianalisis, pelaporan CSR mencakup aspek lingkungan seperti pengelolaan dampak aktivitas tambang, data emisi, penggunaan energi, air, serta program reklamasi lahan. Pada aspek sosial, perusahaan melaporkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, beasiswa, kesehatan, dan pembangunan fasilitas umum. Dari sisi ketenagakerjaan dan K3, perusahaan mengungkapkan kebijakan keselamatan kerja, kasus kecelakaan, serta perlindungan tenaga kerja. Aspek ekonomi dilaporkan melalui kontribusi terhadap negara, dukungan kemitraan UMKM, dan transparansi dana CSR, sementara aspek tata kelola mencakup kepatuhan terhadap regulasi, penggunaan standar pelaporan GRI, serta mekanisme keterlibatan stakeholder. Perusahaan BUMN seperti ANTM, PTBA, dan TINS cenderung lebih patuh karena pengawasan pemerintah, terlihat dari penerbitan sustainability report (Laporan Keberlanjutan) adalah alat ukur dan pelaporan yang lebih komprehensif untuk mengukur kinerja CSR terpisah, sedangkan beberapa perusahaan swasta masih melaporkan CSR secara singkat dan belum mengikuti standar internasional (Ridwan, 2016).

PEMBAHASAN

Bentuk Indikator Pengungkapan Akun CSR

Indikator kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) terdiri dari 93 perusahaan yang terdaftar di GRI pada subsektor seperti Aspek Bahan dan Energi, Aspek Air dan Keanekaragaman Hayati, Aspek Emisi, Lombah, dan Efluen Aspek Produk, Kepatuhan, dan Transportasi dan aspek lain-lain. Indikator ini mencakup beberapa aspek penting, mulai dari penggunaan bahan baku dan energi (EN1–EN7), pengelolaan air dan keanekaragaman hayati (EN8–EN14), hingga pengendalian emisi, limbah, dan efluen (EN15–EN26). Selain itu, aspek terkait dampak produk, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, dan efisiensi transportasi (EN27–EN30), serta aspek lainnya seperti investasi lingkungan dan mekanisme pengaduan (EN31–EN34), menjadikan pelaporan CSR lebih terukur dan akuntabel. Dengan struktur indikator tersebut, perusahaan pertambangan dapat mengevaluasi kinerja lingkungannya secara transparan, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan dan pengelolaan

sumber daya alam yang bertanggung jawab. Temuan ini sejalan dengan penelitian Santoso et al., (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan indikator GRI membantu perusahaan menilai dan melaporkan dampak operasional secara sistematis, terutama pada aspek bahan, energi, air, dan emisi, sehingga meningkatkan reputasi lingkungan perusahaan. Selain itu, penelitian Nugroho et al., (2024) menegaskan bahwa pengungkapan indikator CSR secara lengkap, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat menunjukkan keseimbangan antara kinerja bisnis dan tanggung jawab sosial. Kedua penelitian tersebut menekankan bahwa GRI tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai pedoman evaluasi yang mendorong perusahaan meningkatkan efektivitas program CSR, seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Dengan demikian, indikator GRI berperan penting dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan operasional perusahaan pertambangan di Indonesia.

Penamaan Akun CSR

Variasi dalam penggunaan penamaan akun yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagian besar perusahaan menggunakan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai nama akun dalam laporan mereka, sementara sebagian lainnya menggunakan istilah Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun substansi yang dilaporkan serupa, terdapat preferensi istilah yang berbeda dalam penyajiannya. Dominasi penggunaan istilah CSR mengindikasikan bahwa terminologi tersebut masih menjadi standar umum dalam praktik pelaporan perusahaan. Di sisi lain, penggunaan PPM cenderung menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah operasional, sedangkan TJSL lebih mencerminkan penyesuaian terhadap istilah yang digunakan dalam regulasi di Indonesia. Dengan demikian, variasi penamaan akun tersebut merepresentasikan perbedaan fokus dan pendekatan perusahaan dalam menggambarkan komitmen sosial dan lingkungannya.

Besaran Dana CSR Yang Dikeluarkan

Rata-rata alokasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan pertambangan BUMN selama periode 2020–2024 tercatat sebesar 2% dari pendapatan, 1% dari perusahaan NON BUMN. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun persentasenya terhadap pendapatan relatif kecil, kontribusi CSR terhadap laba bersih cukup signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan tambang menempatkan CSR sebagai bagian penting dari strategi keberlanjutan, bukan hanya pemenuhan kewajiban administratif. Dana tersebut umumnya difokuskan pada pengembangan masyarakat, perbaikan infrastruktur sosial, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi lokal, sejalan dengan regulasi yang mendorong implementasi tanggung jawab sosial di sektor pertambangan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Sari & Pratama (2023) yang menunjukkan bahwa alokasi CSR sebesar 1–4% dari pendapatan berpengaruh positif terhadap reputasi dan profitabilitas jangka panjang perusahaan tambang. Perusahaan yang menyalurkan CSR secara konsisten juga cenderung memiliki stabilitas keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan yang melakukan alokasi secara fluktuatif. Penelitian Sari & Pratama (2023) turut menegaskan bahwa peningkatan intensitas CSR hingga di atas 4% memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat lokal serta menekan risiko sosial yang dapat mengganggu operasi tambang. Hal ini menegaskan bahwa CSR merupakan bagian integral dari strategi keberlanjutan dan mitigasi risiko dalam industri pertambangan.

Perbedaan Besaran Dana CSR Yang Dikeluarkan Antara Perusahaan Tambang Yang Dimiliki Negara (BUMN) Dan Yang NON-BUMN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik perusahaan BUMN memiliki rata-rata alokasi dana CSR sebesar 2% terhadap pendapatan (revenue) sedangkan Non-BUMN memiliki rata-rata alokasi dana CSR sebesar 1% terhadap pendapatan (revenue). Meskipun persentasenya sama, terdapat perbedaan dalam skala nominal, motivasi, dan fokus pelaksanaan. BUMN umumnya menyalurkan dana CSR dalam jumlah lebih besar karena memiliki aset dan pendapatan lebih tinggi, serta terikat oleh regulasi seperti UU No. 19 Tahun 2003 dan PER-05/MBU/2007. Oleh sebab itu, program CSR BUMN berorientasi pada kewajiban sosial dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan ekonomi produktif di sekitar wilayah tambang.

Sementara itu, perusahaan Non-BUMN melaksanakan CSR secara sukarela *(voluntary)* dengan pendekatan strategis untuk membangun citra dan mendukung keberlanjutan usaha. Kegiatan CSR-nya lebih berfokus pada pelestarian lingkungan, konservasi sumber daya alam dan pengembangan masyarakat lokal. Meskipun tanpa kewajiban hukum, komitmen sosial perusahaan Non-BUMN tetap tinggi dengan proporsi dana CSR yang setara dengan BUMN. Dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya terletak pada orientasi pelaksanaan CSR, BUMN didorong oleh regulasi dan tanggung jawab sosial, sedangkan Non-BUMN lebih berorientasi pada strategi keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitiian Purwanto & Rahmawati, (2025) tentang " Perbandingan Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara BUMN dan Non-BUMN di Sektor Pertambangan Indonesia" yang hasilnya menunjukkan BUMN cenderung melaksanakan CSR berdasarkan kewajiban hukum yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 dan PER-05/MBU/2007. Fokus utama program BUMN adalah infrastruktur sosial dan ekonomi masyarakat sekitar tambang. Sementara itu, Non-BUMN mengarahkan CSR pada inovasi lingkungan dan penciptaan nilai merek jangka panjang. Hal ini juga sejalan dengan peneltian yang dilakukan oleh Purwanto & Rahmawati (2025) tentang "Analisis Komparatif Orientasi CSR antara BUMN dan Swasta di Industri Ekstraktif Indonesia" yang hasilnya menunjukkan bahwa BUMN memiliki program CSR yang lebih luas dalam aspek sosial dan ekonomi, sedangkan perusahaan swasta lebih fokus pada keberlanjutan lingkungan dan efisiensi energi. BUMN didorong oleh mandat pemerintah, sedangkan perusahaan swasta menjadikan CSR sebagai bagian dari *branding* dan *stakeholder engagement strategy.*

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan pertambangan di Indonesia menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI), pelaksanaan CSR mencakup 34 indikator yang menilai aspek penting seperti efisiensi bahan dan energi, pengelolaan air, perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian emisi, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Indikator ini membantu menilai sejauh mana perusahaan menjalankan tanggung jawabnya terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Selain itu, variasi penggunaan istilah seperti "penjualan" dan "pendapatan" dalam laporan keuangan menunjukkan perbedaan fokus pelaporan perusahaan, sehingga menekankan pentingnya konsistensi dan transparansi agar analisis antarperusahaan dapat dilakukan secara adil dan akurat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata alokasi dana CSR terhadap pendapatan mencapai 2,5%. Meskipun tampak kecil, kontribusi ini cukup berarti terhadap profitabilitas dan keberlanjutan sosial-lingkungan. CSR di sektor pertambangan tidak hanya menjadi kewajiban hukum,

tetapi juga strategi bisnis berkelanjutan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Perusahaan BUMN cenderung melaksanakan CSR karena kewajiban regulasi dengan fokus pada pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal, sedangkan Non-BUMN lebih menekankan pada strategi reputasi dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, pelaksanaan CSR di sektor pertambangan dapat dikatakan telah menjadi bagian integral dari strategi perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta memperkuat reputasi dan kepercayaan publik.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama terkait ketersediaan data karena tidak semua perusahaan pertambangan mempublikasikan laporan CSR atau *sustainability report* secara lengkap setiap tahun. Variasi penamaan akun CSR, seperti TJSL, PPM, Comdev, dan Donasi Sosial juga menyulitkan proses klasifikasi data. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada aspek lingkungan sehingga aspek sosial dan tata kelola belum tergali mendalam. Periode penelitian 2020-2024 masih terbatas untuk melihat tren jangka panjang. Metode yang digunakan juga bersifat deskriptif sehingga tidak menganalisis hubungan kausal dengan kinerja keuangan atau persepsi pasar.

REFERENSI

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson Education. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). Organizational Behavior (18th ed.). Pearson.

Aziz, R., Askandar, N. S., & Sudaryanti, D. (2022). *PENGARUH E-SERVICE QUALITY DAN KEPUASAN TERHADAP E- LOYALTY (SURVEY TERHADAP PENGGUNA GOPAY) The Effect of E-Service Quality and Satisfaction on E-Loyalty (Survey on GopayUsers)*. 51–60. https://doi.org/10.30813/bmj.v18i1.3068

Freeman, R. E., Phillips, R. A., & Freeman, R. E. (2002). *Darden Graduate School of Business Administration Stakeholder Theory : A Libertarian Defense*. *01*.

Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1975). *CSR: a review of the literature 47 Corporate social and environmental reporting A review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure*. *8*(2), 47–76.

Hidayah, N. (2022). *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan Batu Bara (The Effect of CSR on the Financial Performance of Coal Mining Companies)*. *November 2021*.

Hidayat, A., & Ramadhan, Y. (2021). Sustainability Reporting in Extractive Industries. In Proceedings of the National Seminar on Business and Economics (pp. 45–52). Universitas Indonesia.

Kartasasmita, P. S. (2020). *Corporate Social Responsibility Disclosure by State-Owned Enterprise in Indonesia*.

Maf'ulla, A. A., & Rachmawati, Imadira I. (2024). *LITERATURE REVIEW: ANALISIS MANFAAT PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP CITRA PERUSAHAAN*. *1*(2).

Masud, A. K., Nurunnabi, M., & Bae, S. M. (2018). *The effects of corporate governance on environmental sustainability reporting : empirical evidence from South Asian countries*.

NAGU, N. (2020). *KINERJA SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BUMN: PENDEKATAN DISCLOSURE DENGAN MENGGUNAKAN GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) STANDARD*.

Nugroho, L., Chaniago, N., Pratiwi, F. A., & Aurelia, F. N. (2024). *Pelita Corporate Social Responsibility (CSR) in Sharia Accounting Perspective : Challenges and Opportunities Towards Sustainability*. *1*(3), 153–167. https://doi.org/10.70550/pelita.v1i3.79

Publicuho, J., Ningtyas, C. P., Kambolong, M., Makmur, M., Oleo, U. H., Kendari, K., & Tenggara, S. (2022). *IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT . ANEKA TAMBANG Tbk . UBPN SULAWESI TENGGARA*. *5*(4), 1091–1112.

Purwanto, E., & Rahmawati, N. E. (2025). *Corporate Social Responsibility : Slack Resources and Board Gender Diversity*. *17*(1), 134–149.

Ridwan. (2016). *Kondisi, Latar Belakang Responsibility, Corporate Social Responsibility, Corporate Social Wahab, Abdul Csr, Kegiatan*. 1–30.

Salim, Y. K., & Mulia, U. B. (2024). *The influence of corporate social responsibility , benefits and career development on intention to apply at startup companies mediated by employer brand (Empirical study on Generation Z in Jakarta)*. *100*.

Santoso, P. T., Putra, A. S., Hendriyani, R. M., & Nopiana, M. (2021). *Implementation strategy of mangrove area conservation based on social capital development : A case study in the east coastal area of Karawang Regency , Indonesia*. *14*(3), 1295–1307.

Sari, M. I., & Pratama, V. Y. (2023). *Analisis Relationship Marketing dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Bank BTN melalui Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening*. *12*(2), 26–37.

Setiawan, A. (2022). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT ANGKASA PURA II*.

Silvera, D. L. (2024). *Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Tinjauan atas Pengaruhnya terhadap Penghindaran Pajak dan Praktik Manajemen Laba*. *4*(1), 35–53.

Solano, S. E., & Montoya, D. A. (2019). *Does Corporate Social Responsibility Affect to Legitimacy of the Companies ? Analysis of Spain and Mexico through the Case Method*. *VIII*(2), 189–205.

Steurer, R. (2006). *Mapping Stakeholder Theory Anew : From the Stakeholder Theory of the Firm to Three Perspectives on Business- Society Relations*.

Tahun, D. I. I., & Nugroho, A. W. (2019). *KOMUNIKASI CSR PERUSAHAAN-PERUSAHAAN*. *9*(2), 51–58. https://doi.org/10.9744/scriptura.9.2.51-58

Widhianto, D. (2024). Penyelewengan Dana CSR Aneka Tambang. *Mercu Buana University*, *May*.

Yunus, M. U. H. R., & Riatno, E. K. A. B. (2019). *PERAN PUBLIC RELATION DALAM MENINGKATKAN CITRA PERUSAHAAN MELALUI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) CABANG BANDAR UDARA FRANS KAISIEPO BIAK*. *1*(1), 1–24.

Zain, R. N. W., Hendriyani, C., Nugroho, D., & Ruslan, B. (2021). Implementation of CSR Activities from Stakeholder Theory Perspective in Wika Mengajar. *Abiwara : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, *3*(1), 102–107. https://doi.org/10.31334/abiwara.v3i1.1846